

Berita Lingkungan Hidup

PENGHARGAAN KALPATARU NINIK MAMAK KAMPAR

Kementerian Lingkungan Hidup mencabut penghargaan lingkungan nasional Kalpataru 2009 yang diraih oleh Ninik Mamak, setelah menemukan bukti-bukti adanya tindakan perusakan hutan lindung yang dilakukan Ninik Mamak dengan membangun jalan di kawasan Hutan Lindung Ulayat Rimbo Tujuh Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

Sebelumnya Ninik Mamak menerima penghargaan Kalpataru 2009 yang diberikan oleh Presiden RI pada hari Lingkungan Hidup sedunia pada 5 Juni lalu, atas usahanya melestarikan fungsi lingkungan hidup di hutan wisata alam Ulayat Rimbo Tujuh seluas 1.000 hektar, di Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

Pencabutan penghargaan tersebut dituangkan dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 4677 Tahun 2009. "Pada dasarnya saya prihatin atas pencabutan ini. Namun berdasarkan hasil observasi di lapangan, Ninik Mamak terbukti melakukan perusakan lingkungan. Setelah melakukan peninjauan ulang, maka kami putuskan untuk mencabut penghargaan tersebut," ujar Menteri Negara Lingkungan Hidup, Rahmat Witoelar kepada wartawan, di gedung Kementerian Lingkungan Hidup, Jalan DI Panjaitan, Jakarta Timur, Rabu (2/9).

Ninik Mamak terbukti melakukan perusakan Hutan Lindung Ulayat Rimbo Tujuh, dengan membangun jalan sepanjang 3, 036 kilometer dengan lebar 15 meter. Pembangunan jalan tersebut dipimpin oleh Ninik Mamak yang dipelopori oleh Penghulu Adat Dahlan Datuk Majalelo dan Kepala Desa Zulkarnain JS. Akibat pembangunan jalan tersebut telah mengakibatkan kerusakan hutan berupa penebangan-penebangan pohon yang sudah berusia ratusan tahun.

Menurut Deputi VI Kementerian Lingkungan Hidup Bidang Komunikasi dan Pemberdayaan Masyarakat, Henry Bastaman, Ninik Mamak mengaku pembangunan jalan tersebut dilakukan untuk membuka akses pedesaan di kawasan tersebut, yang dinilai terisolasi dari dunia luar. "Namun setelah kami kroscek, ternyata tidak sinkron. Jalan yang dibangun terlalu besar. Selain itu juga masih ada jalan alternatif lain menuju kawasan tersebut," kata Henry.

Berdasarkan penyelidikan yang dilakukan Dewan Pertimbangan Kalpataru, Ninik Mamak sudah merencanakan pembangunan jalan tersebut sejak bulan April lalu. Artinya, Ninik Mamak sudah memiliki rencana tersebut sebelum penghargaan diberikan pada bulan Juni. "Tetapi Ninik Mamak tidak pernah memberikan konfirmasi kepada tim verifikasi penghargaan Kalpataru perihal rencana tersebut," ujarnya.

Seandainya tim verifikasi mengetahui rencana tersebut, tambah Henry, maka pihaknya tidak akan memberikan penghargaan Kalpataru tersebut kepada Ninik Mamak. "Sebelum kegiatan ini berlangsung juga sudah ada perlawanan dari 232 warga Desa Buluh Cina, tapi kegiatan perusakan ini tetap berlangsung," ungkapnya.

Lebih lanjut, menurut Rahmat Witoelar, pihaknya juga sudah menyerahkan laporan tertulis kepada Presiden SBY perihal pencabutan tersebut. Namun hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari Presiden. "Laporan ini dilakukan sebagai pertanggungjawaban atas penghargaan yang diberikan langsung oleh Presiden," tukas Rahmat.

Ninik Mamak sendiri dilaporkan sudah menerima keputusan pencabutan penghargaan tersebut. Henry mengatakan, Senin (2/9) pagi tadi, Ninik Mamak sudah mengembalikan trophi dan surat keputusan penghargaan kepada perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup di Riau.

Sedangkan mengenai kondisi hutan yang sudah terlanjur rusak tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup sudah memberikan instruksi kepada Pemda Kabupaten Kampar untuk segera melakukan rehabilitasi. "Kami sudah perintahkan agar pembangunan tersebut dihentikan dan segera mengembalikan kondisi hutan semula," pungkas Rahmat Witoelar.